

PERJANJIAN KINERJA KPU 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Alimubarok
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, Februari 2022

KETUA,

RIFQI ALIMUBAROK

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2022
KPU PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	77%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,8%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Rp. 12.203.803.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp. 6.424.542.000,-
3. Pencairan Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Barat Dalam rangka dukungan Operasional Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.	Rp. 0,-
	Rp. 18.628.345.000,-

Bandung, Februari 2022

KETUA ,

RIFQI ALIMUBAROKH

PERJANJIAN KINERJA 202



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Garut No. 11 Bandung

Telp. 022-7278809 – 7278812

Fax. 022-7215894

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Teppy Wawan Dharmawan, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rifqi Alimubarok
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Februari 2022

PIHAK KEDUA
KETUA,

RIFQI ALIMUBAROK

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,

TEPPY WAWAN DHARMAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se- Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%
4.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat yang di Reviu oleh Inspektorat	B
		Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Jawa Barat	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi	77%

		Birokrasi KPU Provinsi Jawa Barat	
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu.	100%
8.	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
9.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
10.	Meningkatnya penyelesaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%

Program

Anggaran

076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356) | Rp. | 83.943.000,- |
| 2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363) | Rp. | 9.135.000,- |
| 3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364) | Rp. | 105.000.000,- |
| 4. Advokasi dan Sengketa Hukum (6638) | Rp. | 30.722.000,- |
| 5. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) | Rp. | 5.621.192.000,- |
| 6. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710) | Rp. | 574.550.000,- |

076.01.WA Program Dukungan Manajemen

7. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp.	4.908.177.000,-
8. Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)	Rp.	17.300.000,-
9. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	Rp.	20.200.000,-
10. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Rp.	7.218.302.000,-
11. Data dan Informasi (6634)	Rp.	39.824.000,-
12. Pencairan Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Barat Dalam rangka dukungan Operasional Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.	Rp.	0

Rp. 18.628.345.000,-

Bandung, Februari 2022

PIHAK KEDUA


RIZKI ALIMUEKROK

PIHAK PERTAMA


TEPPY WAWAN DEWAWAN